

**PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL
PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Abdul Aziz Siregar

NPM : 1305170149

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Abdul Aziz Siregar, NPM 1305170149 Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Pada PT Perkebunan Nusantara (Persero) III. Skripsi, 2017.

Menanggulangi perkembangan bisnis baru, diakui bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah kewajiban perusahaan. Bilamana kewajiban ini dikaitkan dengan fungsi perusahaan maka CSR harus dilakukan secara sukarela bukan karena paksaan dari luar. Saat ini bentuk akuntansi pertanggungjawaban sosial belum mempunyai format baku sehingga pelaporannya masih bersifat sukarela

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Pada PT Perkebunan Nusantara (Persero) III. Pendekatan penelitian digunakan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara, dengan teknik analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan PT Perkebunan Nusantara III telah melaksanakan pelaksanaan aktifitas tanggung jawab sosial sesuai yang telah digariskan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas BAB V TJSL pasal 74 ayat 1 – 4 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan, PT Perkebunan Nusantara III melakukan aktifitas berupa tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup, tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan dan tanggung jawab sosial terkait tanggung jawab terhadap konsumen. Penentuan besaran biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan melalui penetapan anggaran pada awal tahun yang penetapan anggaran tersebut berdasarkan evaluasi hasil realisasi yang dilakukan pada tahun sebelumnya PT Perkebunan Nusantara III mempunyai komitmen yang kuat atas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban perusahaan.

Kata Kunci : Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial, CSR

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.wb.

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini merupakan salah satu pertanggung jawaban penulis dalam sidang mempertahankan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendorong dan membantu dalam penyusunan Skripsi ini, baik secara moril, materil maupun spirituil, kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan ananda untuk dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri.,SE., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
3. Bapak Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi
5. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi.
6. Ibu Dr Widia Astuty, SE.,M.Si, Ak, QIA, CA,CPAI selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya Skripsi ini.
7. Seluruh Sahabat dan rekan-rekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Dalam penyusunan Skripsi, penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyajian Skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan Skripsi ini. Penulis mengharapkan, semoga Skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca secara umum dan secara khusus bagi penulis. Akhir kata penulis haturkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, Oktober 2017

Abdul Aziz Siregar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Uraian Teoritis.....	9
1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	9
2. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial	12
3. Penelitian Terdahulu	19
B. Kerangka Berfikir	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Pendekatan Penelitian.....	23
B. Defenisi Operasional Variabel Penelitian.....	23
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
D. Jenis dan Sumber Data	25
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Hasil Penelitian.....	27
B. Pembahasan	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Keuangan Perusahaan.....	6
Tabel III.1	Kisi-kisi wawancara	24
Tabel III.2	Waktu Penelitian	24
Tabel IV.1	Persentase CSR	42
Tabel IV.2	Proporsi Biaya CSR	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berfikir	22
-------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perusahaan-perusahaan yang berdiri dan beroperasi di lingkungan padat penduduk memiliki tanggung jawab kepada lingkungannya, hal ini untuk menjaga agar terjalinnya hubungan yang baik antar penduduk dan warga sekitar, warga sekitar pasti berharap akan lapangan pekerjaan dan bantuan sosial lainnya dari perusahaan yang kegiatan operasionalnya berlangsung di sekitaran mereka, seperti limbah pabrik, truk pengangkut barang dan sebagainya.

Fungsi perusahaan yang begitu besar dan luas, maka perusahaan dapat dengan leluasa menjalankan usahanya tersebut. Memang tujuan perusahaan adalah untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, namun ada tujuan yang lebih penting bagi perusahaan dari pada itu, yaitu untuk mencari laba yang sebesar-besarnya. Misi perusahaan agar dapat menghasilkan laba yang sebesar-besarnya membuat perusahaan mencari peluang guna mencapai tujuan tersebut dengan berbagai cara sehingga akhirnya dapat berdampak negatif bagi lingkungannya. Dampak negatif tersebut antara lain polusi udara, keracunan, eksploitasi sumber daya alam, kebisingan yang dihasilkan oleh 2 mesin produksi dan lain-lain. Dampak negatif tersebut jika tidak dikontrol maka akan merugikan masyarakat dan lingkungannya. Dampak ini disebut *social cost*.

Karena besarnya dampak *social cost* terhadap masyarakat, maka masyarakat menginginkan dampak tersebut dikontrol sehingga tidak menimbulkan efek negatif yang terlalu besar. Namun, tidak semua perusahaan berdampak negatif seperti yang disebutkan diatas, yaitu hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya. Akan tetapi banyak perusahaan yang memberikan layanan yang memuaskan masyarakat sekitarnya untuk dapat melangsungkan aktivitas perusahaan, sehingga membuat masyarakat lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya. Usaha bisnis sekarang ini tidak hanya dilihat dari kualitas produk suatu perusahaan tapi juga dinilai bagaimana perlakuan perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini diharapkan agar perusahaan tidak hanya mencari keuntungan yang berlipat ganda tetapi juga memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya.

Penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap tanggungjawab sosialnya. Menurut William J. Bryon (2010) dalam *The Power of Principles* ada empat tingkat tanggung jawab sosial, yaitu ekonomis, legal, etis, dan bebas. Keempatnya penting, secara bersamaan mereka menjelaskan apa yang sering ditunjuk sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau kewargaan perusahaan yang baik.

Tingkat satu, tanggung jawab ekonomis mengharuskan beberapa atau semua langkah berikut pada saat-saat strategis dan di dalam kesinambungan strategis, meningkatkan harga, mengurangi biaya, memutuskan pengurangan tenaga kerja demi efisiensi, memerintahkan pembaharuan atau penggantian gedung dan perlengkapan, memperkenalkan teknologi baru, penemuan pasar-pasar baru, dan pengandaian resiko.

Tingkat kedua, tanggung jawab legal di dalam kehidupan perusahaan berarti menaati hukum dan mengakui bahwa hukum yang mengatur dimaksudkan untuk menjaga kompetisi. Penghormatan terhadap hukum wajib dan mutlak dimiliki oleh setiap perusahaan. Disinilah perusahaan bisa menaati aturan-aturan termasuk segala bentuk perundangundangan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial. Tingkat ketiga, yakni tanggung jawab etis dimaksudkan sebagai penghormatan terhadap

martabat manusia (termasuk didalamnya karyawan, konsumen, rekan kerja, pesaing, dan sebagainya). Selain itu, tanggung jawab etis juga termasuk sebagai penghormatan atas lingkungan fisik yang telah menjadi dampak atas kegiatan perusahaan.

Tingkat yang tertinggi adalah sikap bebas dan sukarela terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Tingkatan ini lebih penting daripada tanggung jawab yang lain dibawahnya. Sebab pada tingkat ini lebih menekankan sikap sosial yang sukarela tanpa adanya dorongan baik secara 4 sosial yang sukarela tanpa adanya dorongan baik secara sosial maupun hukum yang diberlakukan oleh pemerintah. Tingkat tertinggi ini, yang terjadi adalah hubungan-hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme.

Baik antara perusahaan dengan pekerja atau pemegang saham dalam konteks internal, maupun dengan lingkungan dan masyarakat pada konteks eksternal. Dalam hubungan dengan masyarakat pun, tidak ada lagi gap dengan perusahaan. Perusahaan dan masyarakat menjadi menyatu, sehingga tidak akan ada lagi kesenjangan sosial yang mungkin terjadi dalam hubungan industrial.

Menanggulangi perkembangan bisnis baru, diakui bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah kewajiban perusahaan. Bilamana kewajiban ini dikaitkan dengan fungsi perusahaan maka CSR harus dilakukan secara sukarela bukan karena paksaan dari luar. Saat ini bentuk akuntansi pertanggungjawaban sosial belum mempunyai format baku sehingga pelaporannya masih bersifat sukarela.

Selain UU No. 40 tahun 2007 dan PP No. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas terdapat juga peraturan yang mengatur perusahaan yang dimiliki pihak pemerintah (BUMN) yaitu peraturan Menteri BUMN tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Per-

05/MBU/2007 yang kemudian terakhir diubah tanggal 27 Juni 2013 dengan peraturan menteri BUMN NO: PER-08/MBU/2013. Dalam peraturan menteri BUMN terbaru tersebut program Bina Lingkungan BUMN Peduli dilaksanakan terakhir sampai dengan tahun 2012 dan dapat terus berjalan selama anggaran sampai dengan tahun 2012 masih tersedia , namun program kemitraan tetap berjalan selama anggaran untuk program kemitraan masih ada. Oleh sebab itu untuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan diserahkan kembali kepada perusahaan tersebut untuk melaksanakannya sendiri. Sehingga tidak hanya perusahaan swasta yang menjalankan tanggungjawab sosial namun perusahaan milik pemerintah juga menjalankannya.

Keterbukaan informasi tentang pelaksanaan CSR sesuai dengan PSAK No. 1 paragraf 15 menyatakan bahwa Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri yang dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut diluar ruang lingkup standar akuntansi keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012). Akuntansi pertanggungjawaban sosial atau akuntansi sosial sangat berguna dalam melaporkan informasi bentuk kontribusi yang telah dilakukan perusahaan tersebut terhadap lingkungan dan sosial, Selain itu sebagai informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan. Walaupun belum ada standar akuntansi baku tentang pengukuran dan pelaporan, akan tetapi penerapan ini bertujuan agar perusahaan memiliki kesadaran empati yang tinggi terhadap tanggung jawab sosialnya karena berdirinya perusahaan akan berdampak terhadap lingkungan sekitar.

Penelitian ini akan membahas aktivitas sosial pada PT Perkebunan Nusantara (Persero) III, Perusahaan ini memiliki area disekitar kawasan padat penduduk yang harus memperhatikan kondisi lingkungannya terkait dampak yang ditimbulkan dari aktivitas-aktivitas perusahaan, baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, dan penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan akuntansi tanggungjawab sosial perusahaan dalam menilai kinerja sosial perusahaan. Adapun berdasarkan observasi dan pengamatan yang dilakukan peneliti didapatkan hasil bahwa penyajian biaya sosial perusahaan belum transparan dan belum dapat dilihat oleh masyarakat secara luas, perusahaan hanya menyajikan data CSR tentang program kemitraan namun tidak menyajikan data keuangan tentang pogram bina lingkungan. Hal ini juga tentunya menjadi perhatian dikarenakan penyaluran dana CSR merupakan salah satu akun dalam biaya operasi perusahaan yang akan mengurangi laba dan tentunya akan mengurangi nilai pajak yang dibayarkan ke pemerintahan.

Saat ini sesuai dengan ketentuan pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban soal pemberian CSR tersebut hanya terbatas pada perseroan atau perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam., namun nilai atau jumlah CSR yang harus dikeluarkan perusahaan belum ditetapkan, namun sudah dibahas dan direncanakan oleh pihak DPR bahwa persentase pengeluaran biaya CSR adalah dalam kisaran 2-3% dari pendapatan (kompas.com/2016/04/25).

Adapun data keuangan perusahaan PT Perkebunan Nusantara (Persero) III disajikan sebagai berikut :

**Tabel I.1 Data Keuangan Perusahaan
(dalam Ribuan)**

Tahun	Pendapatan	Biaya CSR dikeluarkan	Persentase Proporsi CSR
2011	6.538.892.766	30.722.597	0,470%
2012	5.963.806.274	17.837.832	0,299%
2013	5.732.517.940	7.731.003	0,135%
2014	39.497.963.053	42.084.951	0,107%
2015	36.212.111.250	39.800.644	0,110%

Sumber : Data Keuangan (2017) Diolah

Berdasarkan data di atas terlihat bahwasannya terjadi perubahan pengeluaran biaya CSR oleh perusahaan dari tahun ke tahun, peneliti mencoba membandingkan jumlah pendapatan dan biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan, sehingga dapat dilihat presentase proporsi pengeluaran biaya CSR pada perusahaan yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, penurunan proporsi biaya CSR ini mengindikasikan bahwa pendapatan perusahaan meningkat namun pengeluaran biaya CSR nya mengalami penurunan, kemudian juga dapat terlihat bahwasannya jumlah pengeluaran biaya CSR tidak sampai pada nilai 1% dari pendapatan perusahaan, padahal menurut Kotler dan lee (2005) Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR akan mendapatkan manfaat, salah satunya adalah terciptanya peningkatan penjualan karena reputasi perusahaan yang dinilai baik serta bertanggung jawab.

Berdasarkan fenomena dan dukungan teori yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial pada PT Perkebunan Nusantara (persero) III.”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun masalah-masalah dari fenomena di atas adalah :

1. Adanya penurunan proporsi pengeluaran biaya CSR dari pendapatannya dari tahun ke tahun
2. Laporan akuntansi pertanggungjawaban yang tidak transparan dan belum dapat dilihat masyarakat luas
3. Persentase pengeluaran CSR tidak sampai 1% dari pendapatan perusahaan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian yaitu : “Bagaimanakah Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada lingkungan sekitarnya pada PT Perkebunan Nusantara (persero) III?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada lingkungan sekitarnya pada PT Perkebunan Nusantara (persero) III

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat di ambil dari penulisan ilmiah ini adalah dengan adanya penelitian ini dapat diketahui kondisi serta kinerja perusahaan yang dilihat melalui Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada lingkungan sekitarnya pada PT Perkebunan Nusantara

(persero) III, Penulisan ilmiah ini diharapkan menjadi pedoman atau sebagai bahan evaluasi bagi manajemen perusahaan agar dapat dijadikan masukan dan dasar dalam pengambilan keputusan.

b. Manfaat teoritis

Penulisan ilmiah ini diharapkan menjadi suatu bahanpustaka,referensi,serta dapat membantu pembaca, khususnya mahasiswa/i yang mempunyai minat untuk meneliti kondisi keuangan suatu perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

a. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial merupakan salah satu bagian dari empat pilar tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu perusahaan diluar tanggung jawab ekonomi dimana suatu perusahaan harus menghasilkan keuntungan atau laba, tanggung jawab dalam menaati hukum, dan tanggung jawab etis (Nursahid, 2006:2).

Menurut Budimanta, Prasetyo & Rudianto (2004: 72) *Corporate Social Responsibility* diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Kotler dan Lee (2005: 3) mendefinisikan pertanggungjawaban sosial perusahaan sebagai berikut: “*Corporate social responsibility is a commitment to improve community well-being through discretionary business practice and contributions of corporate resource.*” “Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktek bisnis dan kontribusi dari sumber daya perusahaan.”

Menurut Wibisono (2007: 8) CSR merupakan tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif, dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi,

sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan dari berbagai macam definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada *stakeholder* yang melibatkan baik pekerja maupun masyarakat sekitar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, yang mana tindakan tersebut dinilai baik untuk bisnis dan pengembangannya.

b. Dasar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Suharto (2008) dalam komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan (*firm's behaviour*), termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci :

1. *Good corporate governance*: etika bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan kerja.
2. *Good corporate responsibility*: pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, dan penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, perilaku atau cara perusahaan memperhatikan dan melibatkan semua *stakeholder* merupakan konsep utama CSR. Pandangan lebih komprehensif mengenai CSR dikemukakan oleh Carrot (dalam Nursahid, 2006: 14-15) dalam Teori Piramida Tanggung Jawab Perusahaan (gambar 1). Tanggung jawab perusahaan dapat dilihat dari empat jenjang yang merupakan satu kesatuan. Untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi perusahaan harus menghasilkan laba sebagai pondasi untuk berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Namun, dalam

mencapai tujuan laba, perusahaan juga harus bertanggung jawab secara hukum dengan mentaati hukum yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga bertanggung jawab secara etis dengan mempraktikkan hal-hal yang baik dan benar sesuai nilai-nilai etis.

c. Sifat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Untung (2008:10) menyebutkan terdapat dua sifat *corporate social responsibility*, yaitu sebagai berikut :

1. Sifatnya kedalam atau internal

CSR yang sifatnya kedalam menyangkut transparansi, sehingga ada yang namanya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yaitu mekanisme bagaimana sumber daya perusahaan dialokasikan menurut aturan hak dan kuasa. Di kalangan perusahaan publik diukur dengan keterbukaan informasi.

2. Sifatnya keluar atau eksternal

CSR yang sifatnya keluar menyangkut lingkungan tempat perusahaan berada. Perusahaan harus memperhatikan polusi, limbah maupun partisipasi lainnya. *Stakeholder* perusahaan diluar dapat dikategorikan, ada masyarakat, pemasok, pelanggan, konsumen, maupun pemerintah. Hendaknya dalam setiap pelaksanaan CSR harus memperhatikan lingkungan internal maupun eksternalnya. Apabila perusahaan ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat, lingkungan, *stakeholder* dan semua hal lain yang terlibat di dalamnya, maka perusahaan harus mengetahui apa yang lingkungan tersebut butuhkan, bukan sekedar apa yang perusahaan ingin buat. Oleh karena itu, diharapkan adanya komunikasi sebelum membuat program CSR.

2. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

a. Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Menurut Belkaoui dalam Komar (2004) “Akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya.”

Akuntansi pada mulanya diartikan hanya sekedar prosedur pemrosesan data keuangan. Pengertian ini dapat ditemukan dalam *Accounting Terminology Bulletin* yang diterbitkan oleh AICPA (*American Institute of Certified Public Accounting*). Dalam *Accounting Terminology Bulletin* no.1 dinyatakan sebagai berikut : *Accounting is the art of Recording, classifying and summarizing in a significant manner and in the term of money, transaction and even which are and part, at least of financial character and interpreting the result there of.* Artinya : Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai mata uang, semua transaksi serta kejadian yang sedikit-sedikit bersifat finansial dan dari catatan itu dapat ditafsirkan hasilnya. (AICPA,1998)

Sedangkan menurut Soemarso (2004:14) akuntansi didefinisikan sebagai berikut: Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien. Akuntansi dapat juga didefinisikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Menurut Arfan Ikhsan (2008:14) Akuntansi lingkungan didefinisikan sebagai pencegahan, pengurangan dan atau penghindaran dampak terhadap lingkungan,

bergerak dari beberapa kesempatan, dimulai dari perbaikan kembali kejadian-kejadian yang menimbulkan bencana atas kegiatan-kegiatan tersebut.

Dalam hal ini, pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari operasional perusahaan yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan, sebab pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan pengidentifikasian, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan biaya pengelolaan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan.

b. Biaya-biaya yang terdapat Dalam Akuntansi Lingkungan

Menurut Irawan (2001) dalam situs lintas ekonomi menyatakan bahwa Biaya lingkungan dapat diartikan sebagai biaya yang muncul dalam usaha mencapai tujuan seperti pengurangan biaya lingkungan yang meningkatkan pendapatan, meningkatkan kinerja lingkungan yang perlu dipertimbangkan saat ini dan yang akan datang.

Menurut Arfan Ikhsan (2008:35) Biaya lingkungan pada dasarnya berhubungan dengan biaya produk, proses, sistem atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Sedangkan menurut Susenohaji (2003:40) biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan yang dilakukan.

Biaya lingkungan mencakup baik biaya internal (berhubungan dengan pengurangan proses produksi untuk mengurangi dampak lingkungan) maupun eksternal:

1. Biaya pemeliharaan dan penggantian dampak akibat limbah dan gas buangan (waste and emission treatment), yaitu biaya yang dikeluarkan untuk

memelihara, memperbaiki, mengganti kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah atau kegiatan perusahaan.

2. Biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan (*prevention and environmental management*) adalah biaya yang dikeluarkan untuk pencegahan dan pengelolaan untuk menghindari kerusakan lingkungan.

3. Biaya pembelian bahan untuk bukan hasil produksi (*material purchase value of non-product*) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan yang bukan hasil produksi dalam rangka pencegahan dan pengurangan dampak limbah dari bahan baku produksi.

4. Biaya pengelolaan untuk produk (*processing cost of non-product output*) ialah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengolahan bahan yang bukan hasil produk.

5. Penghematan biaya lingkungan (*environmental revenue*) merupakan penghematan biaya atau penambahan penghasilan perusahaan sebagai akibat dari pengelolaan lingkungan.

Menurut Hansen mowen dalam Deni Arnos K (2007:72) menyebutkan bahwa biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori: biaya pencegahan (*prevention cost*), biaya deteksi (*detection cost*), biaya kegagalan internal (*internal failure cost*), dan biaya kegagalan eksternal (*external failure cost*).

c. Tahap-Tahap Perlakuan Alokasi Biaya Lingkungan

Sebelum mengalokasikan pembiayaan untuk pengelolaan dampak lingkungan seperti pengelolaan limbah, pencemaran lingkungan, dan efek sosial masyarakat lainnya, perusahaan perlu merencanakan tahap pencatatan biaya tersebut. Tahap-tahap ini dilakukan dalam rangka agar pengalokasian anggaran yang telah

dipersiapkan untuk satu tahun periode akuntansi tersebut dapat diterapkan secara tepat dan efisien.

Richard Kingstone (2003) dalam situs berita di Amerika Serikat menyatakan bahwa pencatatan untuk mengelola segala macam yang berkaitan dengan limbah sebuah perusahaan didahului dengan perencanaan yang akan dikelompokkan dalam pos-pos tertentu sehingga dapat diketahui kebutuhan riil setiap tahunnya. Menurut Murni (2001) pengelompokkan dalam tahap analisis lingkungan antara lain sebagai berikut :

1. Identifikasi

Pertama kali perusahaan hendak menentukan biaya untuk pengelolaan biaya penanggulangan *externality* yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional usahanya adalah dengan mengidentifikasi dampak-dampak negatif tersebut.

2. Pengakuan

Elemen-elemen tersebut yang telah diidentifikasi selanjutnya diakui sebagai rekening dan disebutkan sebagai biaya pada saat menerima manfaat dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan tersebut. Pengakuan biaya-biaya dalam rekening ini dilakukan pada saat menerima manfaat dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan sebab pada saat sebelum nilai atau jumlah itu dialokasikan tidak dapat disebut sebagai biaya sehingga pengakuan sebagai biaya dilakukan pada saat sejumlah nilai dibayarkan untuk pembiayaan pengelolaan lingkungan.

3. Pengukuran

Perusahaan pada umumnya mengukur jumlah dan nilai atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan tersebut dalam satuan moneter yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran nilai dan jumlah biaya yang akan dikeluarkan ini

dapat dilakukan dengan mengacu pada realisasi biaya yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya, sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai kebutuhan riil setiap periode. Dalam hal ini, pengukuran yang akan dilakukan untuk menentukan kebutuhan pengalokasian tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan sebab masing-masing perusahaan memiliki standar pengukuran jumlah dan nilai yang berbeda-beda.

4. Penyajian

Biaya yang timbul dalam pengelolaan lingkungan ini disajikan bersama-sama dengan biaya-biaya unit lain yang sejenis dalam sub-sub biaya administrasi dan umum. Penyajian biaya lingkungan ini didalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan nama rekening yang berbeda-beda sebab tidak ada ketentuan yang baku untuk nama rekening yang memuat alokasi pembiayaan lingkungan perusahaan tersebut.

5. Pengungkapan

Pada umumnya, akuntan akan mencatat biaya-biaya tambahan ini dalam akuntansi konvensional sebagai biaya overhead yang berarti belum dilakukan spesialisasi rekening untuk pos biaya lingkungan. Akuntansi lingkungan menuntut adanya alokasi pos khusus dalam pencatatan rekening pada laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sehingga dalam pelaporan akuntansi keuangan akan muncul bahwa pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan tidak sebatas pada retorika namun telah sesuai praktis didalam pengelolaan sisa hasil operasional perusahaan.

d. Fungsi dan Peran Akuntansi Lingkungan

Menurut Arfan Ikhsan (2008:18) Fungsi dan peran akuntansi lingkungan dibagi ke dalam dua bentuk. Fungsi internal dan fungsi eksternal.

1. Fungsi Internal

Fungsi internal merupakan fungsi yang berkaitan dengan pihak internal perusahaan itu sendiri. Pihak internal adalah pihak yang menyelenggarakan usaha, seperti rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi maupun jasa lainnya. Adapun yang menjadi aktor dan faktor dominan pada fungsi internal ini adalah pimpinan perusahaan. Sebab pimpinan perusahaan merupakan orang yang bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan maupun penentuan setiap kebijakan internal perusahaan. Sebagaimana hanya dengan sistem informasi lingkungan perusahaan, fungsi internal memungkinkan untuk mengukur biaya konservasi lingkungan dan menganalisis biaya dari kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan pengambilan keputusan. Dalam fungsi internal ini diharapkan akuntansi lingkungan berfungsi sebagai alat manajemen bisnis yang dapat digunakan oleh manajer ketika berhubungan dengan unit-unit bisnis.

2. Fungsi Eksternal

Fungsi Eksternal merupakan fungsi yang berkaitan dengan aspek pelaporan keuangan. SFAC No. 1 menjelaskan bahwa pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit dan yang serupa secara rasional. Informasi tersebut harus bersifat komprehensif bagi mereka yang memiliki pemahaman yang rasional tentang kegiatan bisnis dan ekonomis dan memiliki kemauan untuk mempelajari informasi dengan cara yang rasional.

Pada fungsi ini faktor penting yang perlu diperhatikan perusahaan adalah pengungkapan hasil dari kegiatan konservasi lingkungan dalam bentuk data akuntansi. Informasi yang diungkapkan mereka hasil yang diukur secara kuantitatif

dari kegiatan konservasi lingkungan. Termasuk didalamnya adalah informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut (kewajiban suatu perusahaan untuk menyerahkan sumber-sumber pada entitas lain atau pemilik modal), dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mengubah sumber-sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut.

Fungsi eksternal memberi kewenangan bagi perusahaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan *stakeholders*, seperti pelanggan, rekan bisnis, investor, penduduk lokal maupun bagian administrasi. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Diharapkan dengan publikasi hasil akuntansi lingkungan akan berfungsi dan berarti bagi perusahaan-perusahaan dalam memenuhi pertanggungjawaban serta transparansi mereka bagi para *stakeholders* yang secara simultan sangat berarti untuk kepastian evaluasi dari kegiatan konservasi lingkungan.

e. Pelaporan Akuntansi Lingkungan

Menurut Hansen Mowen dalam Deni Arnos Kwari (2007:74) pelaporan akuntansi lingkungan adalah penting jika sebuah organisasi serius untuk memperbaiki kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya lingkungannya. Langkah pertama yang baik adalah laporan yang memberikan perincian biaya lingkungan menurut kategori. Pelaporan biaya lingkungan menurut kategori memberikan dua hasil yang penting:

1. Dampak biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan
2. Jumlah relatif yang dihabiskan untuk setiap kategori

Menurut Arfan Ikhsan (2008:140) pengungkapan dalam akuntansi lingkungan merupakan jenis pengungkapan sukarela. Pengungkapan akuntansi lingkungan pada

bahasan ini merupakan pengungkapan informasi data akuntansi lingkungan dari sudut pandang fungsi internal akuntansi lingkungan itu sendiri, yaitu berupa laporan akuntansi lingkungan. Laporan tersebut harus didasarkan pada situasi aktual pada suatu perusahaan atau organisasi lainnya. Data aktual diungkapkan ditentukan oleh perusahaan sendiri atau organisasi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan ketika pengungkapan data eksternal akuntansi lingkungan untuk mengklarifikasi prasarat dari pengungkapan data, supaya *stakeholders* memperoleh pemahaman konsisten dari data akuntansi lingkungan. Adapun dimensi dalam pengungkapan data akuntansi lingkungan dalam hal meliputi:

1. Proses dan hasil kegiatan konservasi lingkungan
2. Item-item yang membentuk dasar akuntansi lingkungan
3. Hasil yang dikumpulkan dari akuntansi lingkungan

3. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu sesuai dengan judul penelitian peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
Astari (2014)	Penerapan akuntansipertanggungjawabansosial Pada PT. Sier (Persero)	PT. SIER (PERSERO) telah melaksanakan laporan pertanggungjawaban sosial yang diberi nama laporan aktivitas PKBL. Laporan ini hanya menjelaskan kontribusinya kepada masyarakat dan lingkungan, namun tidak terdapat dua aspek pertanggungjawaban sosial yang lain yaitu sumber daya manusia, produk dan jasa.
Noviyanti (2015)	Perilaku Sosial PT. PerkebunanNusantara V (Persero) Sebagai Bentuk Pertanggung Jawaban Sosial	PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) telah melakukantanggung jawab sosial perusahaan terhadap

	Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitar	lingkungan sekitarnya yang terkait dengan masyarakat, lingkungan dan sumber daya manusia walaupun belum secara proporsional.
Lucia (2013)	Analisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban Sosial terhadap lingkungan dan masyarakat untuk Mengukur kinerja sosial pada PT. Astra international, Tbk.	PT. Astra International telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban sosial, dalam hal ini perusahaan telah melaksanakan berbagai macam kegiatan sosial terhadap lingkungan dan masyarakat agar dapat membantu mengentaskan segala problematika yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini

B. Kerangka Berfikir

Suatu perusahaan didirikan untuk tidak mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, manajemen berupaya menghasilkan keuntungan yang maksimal apabila perusahaan tidak memperhatikan seluruh faktor yang mengelilinginya, mulai dari karyawan, konsumen, lingkungan dan sumber daya alam sebagai satu kesatuan yang saling mendukung suatu sistem, maka tindakan itu akan mengakhiri eksistensi perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu, perlu juga dilakukan keseimbangan tata kelola perusahaan yang menyejahterakan masyarakat serta menjamin kelestarian lingkungan hidup, seperti praktik corporate social responsibility (CSR).

Pada PT Perkebunan Nusantara (Persero) III dana CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan dihitung sebagai biaya di laporan laba-rugi sehingga akan mengurangi laba perusahaan, laba perusahaan merupakan dasar penentuan pembayaran pajak penghasilan kepada pemerintahan, sehingga diperlukan transparansi jumlah biaya CSR agar tidak dianggap sebagai manipulasi penambahan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengurangi laba perusahaan. Pada Perkebunan Nusantara (Persero) III, pengeluaran biaya CSR dikelompokkan kedalam 4 (empat)

bagian, yaitu Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Sosial Kemasyarakatan dan Konsumen.

Pada bagian lingkungan hidup, PTPN III berkomitmen dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, maka Perseroan senantiasa memastikan kegiatan usahanya tidak berdampak bagi lingkungan. Upaya Perseroan diwujudkan melalui partisipasi dalam kelestarian lingkungan. Selain itu kebijakan terkait lingkungan tercermin dari kebijakan perusahaan yang tertuang dalam untuk selalu memperhatikan lingkungan dalam setiap aktivitas kegiatan kerja.

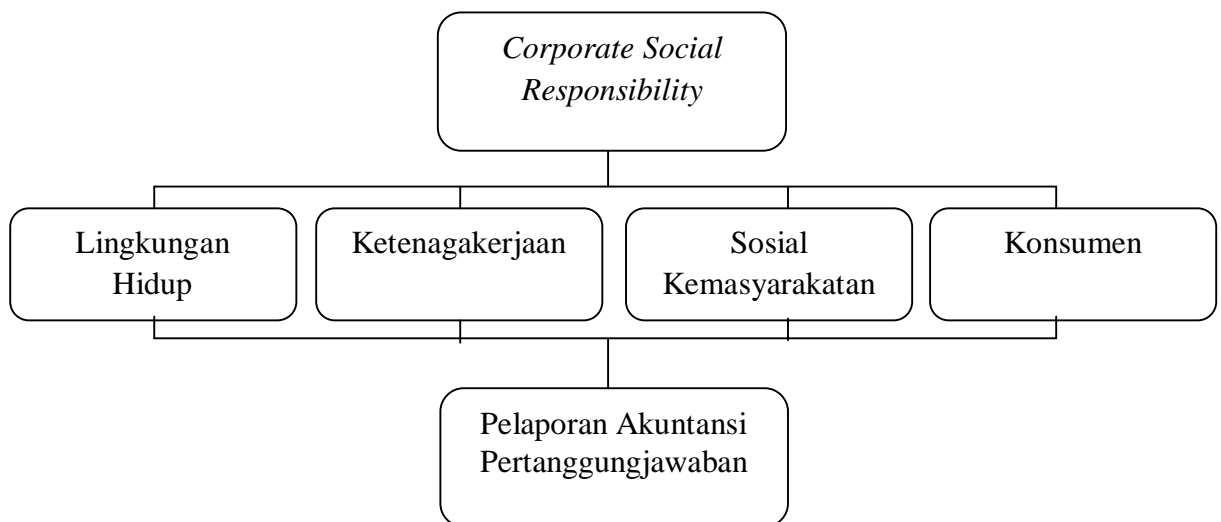
Pada bagian ketenagakerjaan, yang menjadi perhatian penting Perusahaan Keselamatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) khususnya terkait pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan yaitu karyawan. K3 juga dipandang sebagai bagian yang berperan signifikan dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan kondusif bagi setiap pekerja. Setiap tahunnya, perusahaan senantiasa melakukan peninjauan kinerja agar tiap aspek yang memerlukan perbaikan dapat segera ditindaklanjuti.

Pada bagian sosial kemasyarakatan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada aspek sosial kemasyarakatan diarahkan pada program-program yang bersifat memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di lokasi sekitar perseroan berkegiatan. Terutama para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi kurang mampu.

Pada bagian konsumen, perseroan menyadari makna penting dan manfaat dari pemenuhan standar kualitas serta perlindungan konsumen terhadap setiap produk yang dihasilkan, mengingat keduanya mempunyai pengaruh yang signifikan bagi pertumbuhan kinerja usaha secara berkelanjutan. Perseroan menetapkan dan

memberlakukan kriteria yang ketat dalam proses dan output produksi maupun pengawasan kualitas setiap produknya

Atas dasar itu jugalah dibutuhkan pelaporan akuntansi pertanggung jawaban sebagai alat manajemen bisnis yang digunakan oleh pihak internal perusahaan kemudian pelaporan ini juga dibutuhkan oleh pihak investor, kreditur dan pemerintah dalam mempertimbangkan keputusan investasi juga penghitungan perpajakan. Dari uraian di atas dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar II.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, dimana deskriptif analitis adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan informasi dalam mengambil keputusan. Pada penelitian ini akan dideskripsikan tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial.

B. Defenisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah Akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan yaitu pelaporan akuntansi dari aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan pada lingkungan sekitarnya.

- 1) Lingkungan Hidup, merupakan sebuah aktifitas pertanggungjawaban terkait dengan usaha perusahaan dalam menghindari dampak lingkungan akibat aktifitas perusahaan.
- 2) Ketenagakerjaan, merupakan sebuah aktifitas pertanggungjawaban terkait dengan usaha perusahaan dalam memberikan kenyamanan dan keselamatan kerja kepada karyawannya.
- 3) Sosial Kemasyarakatan, merupakan sebuah aktifitas pertanggungjawaban terkait dengan usaha perusahaan dalam melakukan pembinaan lingkungan dan membangun hubungan kemitraan yang baik
- 4) Konsumen, merupakan sebuah aktifitas pertanggungjawaban terkait dengan usaha perusahaan dalam melakukan pelayanan kepada konsumen.

Tabel III.1 Kisi-kisi Wawancara

No	Dimensi	Indikator	No.item
1	Jumlah CSR	- Besaran biaya CSR yang dikeluarkan - Dasar pengeluaran biaya CSR	1 dan 2
2	Sasaran CSR	- Objek penerima CSR - Syarat bagi penerima CSR - Manfaat pengeluaran biaya CSR	3,4 dan 5
3	Akuntansi pertanggungjawaban	- Dasar pelaporan biaya CSR - Aturan akuntansi pertanggungjawaban	6 dan 7

C. Tempat dan Waktu Penelitian**Tempat Penelitian**

Penulis melakukan penelitian pada PT Perkebunan Nusantara (Persero) III, yang beralamat di Jalan Sei Batanghari No. 2, Medan.

Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini Direncanakan dari Bulan Desember 2016 sampai dengan April 2017, dengan perincian waktu sebagai berikut :

**Tabel III.2
Waktu Penelitian**

No	Jenis Agenda	2016-2017																					
		Desember				Januari				Februari				Maret				April					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Riset Pendahuluan	■	■																				
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■																
3	Seminar Proposal							■	■														
4	Pengumpulan Data									■	■	■	■										
5	Pengolahan Data													■	■	■	■						
6	Sidang Meja Hijau																	■	■	■	■		

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif, data kualitatif yaitu data yang berupa penjelasan/ Pernyataan yang tidak berbentuk angka-angka data kuantitatif merupakan data berupa angka-angka yang akan dideskripsikan dan direpresentasikan.

Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara terhadap objek penelitian, dan yang menjadi objek wawancara adalah pihak Humas atau yang menanggungjawab tentang pengelolaan CSR pada PT Perkebunan Nusantara (Persero) III, Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yakni berupa bukti-bukti seperti buku, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan., dalam hal ini data yang dibutuhkan adalah laporan keuangan dan laporan biaya sosial PT Perkebunan Nusantara (Persero) III.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang. Adapun tanya jawab dan diskusi dilakukan oleh penulis kepada bagian Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab dalam kegiatan yang berhubungan dengan *Corporate Social Responsibility* perusahaan.

2. Dokumentasi, yaitu penulis menganalisis data dari dokumen-dokumen yang terkait dengan topik penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis pada penelitian adalah analisis deskriptif. Deskriptif yaitu suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Adapun tahapan analisisnya adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data dan teori pendukung

Awalnya peneliti akan melakukan pengumpulan teori-teori yang berhubungan dengan CSR dan Akuntansi pertanggungjawaban sosial dan data yang berhubungan dengan kegiatan sosial perusahaan, laporan keuangan dan laporan biaya sosial perusahaan.

2. Melakukan observasi dan wawancara

Selanjutnya peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pihak perusahaan dengan instrument wawancara yang telah disiapkan sesuai dengan kisi-kisi wawancara.

3. Melakukan analisa hasil penelitian

Data yang telah dikumpulkan dan hasil wawancara kemudian di analisa dan dibandingkan dengan teori-teori pendukungnya.

4. Menginterpretasikan dan mendeskripsikan hasil penelitian

Hasil penelitian kemudian diinterpretasikan dan dideskripsikan sesuai dengan kebutuhan pada rumusan masalah.

5. Memberikan kesimpulan dan saran

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Aktivitas Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Kepercayaan Masyarakat kepada Perseroan, merupakan energi dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Untuk itulah wujud kepedulian Perseroan terhadap masyarakat dan lingkungan memiliki arti bagi keberlangsungan bisnis sebagai perusahaan perkebunan di tanah air. Perseroan meyakini bahwa bisnis Perseroan akan berkelanjutan apabila memberikan perhatian yang seimbang kepada aspek keuntungan (*profit*), kemanusiaan (*people*), dan lingkungan (*planet*). Untuk meningkatkan kinerja Perseroan, kami berperan aktif dalam memperbaiki dan membangun lingkungan untuk menjadi lebih baik, serta menjadikan masyarakat mandiri dalam ekonomi dan mengelola lingkungan.

Program CSR Perseroan dikelompokkan ke dalam empat bagian yaitu:

- a. Tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup
- b. Tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja
- c. Tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan
- d. Tanggung jawab sosial terkait tanggung jawab terhadap konsumen

PT Perkebunan Nusantara III telah merealisasikan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) untuk masyarakat dilingkungan kerja PTPN III sesuai yang telah digariskan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas BAB V TJSL pasal 74 ayat 1 – 4 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Wujud nyata dari program tersebut telah direalisasikan oleh PTPN III dalam berbagai sektor yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar yang notabene adalah stakeholder yang nantinya diharapkan akan membangun “*corporate image*” positif dari masyarakat terhadap PTPN III dan pada gilirannya dapat meminimalisir potensi konflik dengan masyarakat sekitar. Dalam melaksanakan setiap kegiatan CSR PTPN III tetap bekerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait maupun para pemangku kepentingan dilingkungan unit kerja PTPN III guna menjaga hubungan yang harmonis, sehingga dapat menjamin keberlanjutan perusahaan di masayang akan datang.

PTPN III berkomitmen dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, maka Perseroan senantiasa memastikan kegiatan usahanya tidak berdampak bagi lingkungan. Upaya Perseroan diwujudkan melalui partisipasi dalam kelestarian lingkungan. Selain itu kebijakan terkait lingkungan tercermin dari kebijakan perusahaan yang tertuang dalam *company policy* untuk selalu memperhatikan lingkungan dalam setiap aktivitas kegiatan kerja.

a. Tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup

PTPN III berkomitmen dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, maka Perseroan senantiasa memastikan kegiatan usahanya tidak berdampak bagi lingkungan. Upaya Perseroan diwujudkan melalui partisipasi dalam kelestarian lingkungan. Selain itu kebijakan terkait lingkungan tercermin dari kebijakan perusahaan yang tertuang dalam *company policy* untuk selalu memperhatikan lingkungan dalam setiap aktivitas kegiatan kerja Perusahaan menggunakan material yang ramah lingkungan, yang memenuhi unsur 3R (*Reduce*,

Reuse, Recycle) sebagai sarana pendukung untuk menjalankan produksi komoditas yang memiliki konsep Green Processing.

Definisi dari ketiga unsur tersebut adalah:

- a. *Reduce* : mengurangi penggunaan material yang menimbulkan bahan sisa (limbah) dan juga mengurangi volume limbah itu sendiri. Antara lain dengan merencanakan penggunaan material agar tidak menimbulkan banyak limbah dan material sisa (*waste*).
- b. *Reuse* : menggunakan kembali material sisa yang dihasilkan dari aktivitas produksi/pengolahan untuk digunakan kembali sebagai sarana penunjang aktivitas pengolahan. Diantaranya:
 - 1) Reuse dengan memanfaatkan kembali air limbah yang telah diolah di IPAL untuk di aplikasikan ke lahan sawit guna menambahkan unsure HARA pada lahan sawit.
 - 2) Memanfaatkan janjangan kosong sebagai bahan baku pembuatan Kompos pada tanaman kelapa sawit.
 - 3) Memanfaatkan cangkang dan janjangan kosong sawit sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga Bio Massa (PLTBS).
 - 4) Memanfaatkan gas metane yang terdapat pada limbah cair pabrik kelapa sawit sebagai bahan baku untuk pembangkit listrik tenaga Biogas (PLTBG).
- c. *Recycle* : mendaur ulang beberapa jenis limbah yang memungkinkan untuk di daur ulang dengan melibatkan bantuan pihak ketiga. Selain itu, Perseroan juga memberikan perhatian khusus untuk menjaga lingkungan dengan adanya upaya *Green Construction* yang diterapkan di lingkungan proyek. Salah satu contoh yang diterapkan di lingkungan proyek dalam rangka menjaga lingkungan diantaranya :

- 1) Penggunaan lampu LED di kantor dan pemantauan penggunaan listrik di kawasan perkebunan dengan mewajibkan pemasangan meteran listrik dan melakukan pencatatan rutin.
- 2) Sumber air yang digunakan adalah dari PDAM dan pengolahan air hujan serta untuk beberapa proyek sudah memanfaatkan air dari hasil *dewatering*.
- 3) Kendaraan Operasional dan Alat berat harus lolos Uji Emisi Gas Buang. Pengujian dapat dilakukan oleh Instansi /Lembaga Terkait ataupun Internal Perusahaan.
- 4) Setiap Kendaraan Operasional dan Alat Berat yang digunakan harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Lolos Uji Emisi Gas Buang.
- 5) Penanaman pohon sebagai bagian dari program bersama Pemerintah untuk menanam satu miliar pohon. Penanaman pohon secara tidak langsung akan mengurangi emisi gas karbon. Terlebih beberapa jenis tumbuhan yang ditanam adalah pohon trembesi (*Samanea saman*) yang memiliki tingkat kemampuan penyerapan emisi gas karbon tertinggi.
- 6) Minimasi Limbah, dengan cara manage penggunaan material agar tidak menimbulkan bahan sisa.
- 7) Pemilahan Jenis limbah, dengan mengelompokkan limbah padat ke dalam limbah organik dan non organik
- 8) Pemanfaatan kembali limbah padat untuk keperluan lain, misalnya pemanfaatan sekam sisa gergaji untuk bahan bakar pembuatan bata.
- 9) Pengolahan limbah cair, dengan melakukan filterisasi air buangan proyek sebelum dibuang ke saluran kota.
- 10) Penanggulangan dampak lingkungan yang dibahas pada mitigasi potensi dampak lingkungan dan pengendaliannya.

- 11) Sumur biopori yang bermanfaat bagi proses pengkomposan sampah organik proyek
- 12) Menggunakan bahan yang *reusable* pada material untuk kantor, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan jangka panjang.

b. Tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja

Keselamatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menjadi perhatian penting Perusahaan khususnya terkait pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan yaitu karyawan. Kami menyadari untuk memproduksi komoditas berstandar internasional, tuntutan implementasi K3 akan semakin tinggi. K3 juga dipandang sebagai bagian yang berperan signifikan dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan kondusif bagi setiap pekerja. Setiap tahunnya, kami senantiasa melakukan peninjauan kinerja agar tiap aspek yang memerlukan perbaikan dapat segera ditindaklanjuti.

Untuk memastikan dan memperbaiki kesehatan, keselamatan dan keamanan lokasi kerja, PTPN III melakukan audit Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta pengukuran *Hyperkes* secara berkala dan pelaksanaan manajemen risiko. Skor audit dan jumlah kecelakaan kerja menjadi *Performance Indicator* (PI) masing masing unit tersebut.

Hasil audit dan pemantauan pelaporan bulanan yang dikenal dengan Laporan P2K3 dan Laporan Peristiwa Masalah Umum (LPMU) yang meliputi laporan kecelakaan kerja, kesehatan dan tingkat keamanan seperti pencurian produksi dan lain-lain menjadi dasar untuk memperbaiki lingkungan kerja. Di samping itu, PTPN

III melibatkan seluruh tenaga kerjanya untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan, keamanan dan ergonomis tempat kerja melalui :

- 1) Pembentukan P2K3 (Manajemen, karyawan dan SPBUN)
- 2) Sosialisasi prosedur, peraturan dan hak/ kewajiban
- 3) Pemberian Alat Pelindung Diri (APD) seperti earplug, sarung tangan, masker, sepatu tahan api/bahan kimia, dll
- 4) Pemenuhan kualifikasi, perizinan para personil dan peralatan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- 5) Memberikan pelatihan (OJT, Seminar, dan lain-lain) SMK3 kepada karyawan
- 6) Pemeriksaan berkala kesehatan karyawan yang terlibat langsung dengan penggunaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan lokasi kerja berbahaya
- 7) Pemeriksaan sarana dan prasarana perusahaan
- 8) Pemeriksaan dan uji lingkungan kerja, seperti tingkat kebisingan, humidity, dll
- 9) Pemberian *extra fooding* untuk karyawan yang bekerja dengan bahan kimia, radiasi (komputer,dll)
- 10) Pemenuhan peralatan tanggap darurat
- 11) Pemasangan rambu peringatan di lokasi kerja
- 12) Rapat-rapat pengurus P2K3 secara rutin dan berkala untuk membahas efektivitas penyelesaian permasalahan, keluhan dan masukan karyawan serta kinerja keseluruhan SMK3.
- 13) Memberikan pelatihan *Hyperkes* bagi para dokter PTPN III
- 14) Memberikan pelatihan satpam secara profesional oleh lembaga eksternal
Kepolisian

15) Penataan tempat kerja sesuai dengan ergonomika dan alur kerja, misal tata ruang Pabrik Kelapa Sawit

Keberhasilan kinerja dan target yang dicapai dalam implementasi SMK3 ditunjukkan dengan terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat, efisien dan produktif. Guna menciptakan hal tersebut lokasi kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya diidentifikasi dan setiap tenaga kerja yang bekerja pada lokasi tersebut diberikan pelatihan dan penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan lokasi kerja. Untuk pekerja tertentu yang dipersyaratkan memiliki sertifikat keahlian diberikan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat tersebut.

Sebagai indikator keberhasilan penerapan SMM, SML dan SMK3 tercermin dengan dipertahankannya sertifikat yang sudah diraih dari Badan Sertifikasi yang berwenang dan memperoleh penghargaan Bendera Emas dari Presiden RI. Selanjutnya, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut digunakan acuan keputusan dan peraturan perundangan pemerintah, seperti untuk tingkat kebisingan, *humidity*, emisi udara, *layout* pergudangan dan batasan lainnya sesuai kondisi lingkungan kerja. Penilaian terhadap pemenuhan indikator-indikator keselamatan kerja dilaksanakan setahun sekali dengan memperhatikan berat dampak, skala dampak, lama dampak, pertimbangan biaya, kuantitas dampak dan kepedulian terkait sesuai dengan kondisi lingkungan kerja. Masing-masing item penilaian memiliki batasan nilai kriteria yang bersifat kuantitatif. Nilai rata-rata hasil evaluasi diranking.

Jika nilai aspek ada di atas rata-rata atau aspek tersebut dipersyaratkan dalam peraturan perundangan, maka aspek tersebut menjadi aspek penting/target yang perlu ditindaklanjuti. Layanan antara lain, menyediakan pelayanan kesehatan berupa perawatan kesehatan dan perobatan bagi karyawan beserta batihnya yang diimplementasikan dengan menyediakan poliklinik kebun di setiap kebun/ unit,

tersedianya 4 (empat) unit Rumah sakit dimana ketentuannya diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Selain itu, karyawan juga diberikan izin untuk meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapat gaji sesuai dengan ketentuan dalam PKB.

Karyawan juga didukung dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja seperti diatur dalam PKB dan jaminan sosialserta kesejahteraan tenaga kerja. Bagi para pensiunan, perusahaan juga memberikan jaminan perawatan kesehatan sesuai dengan ketentuan.

Ketentuan di atas berlaku untuk seluruh karyawan dan karyawan honorer PTPN III sedangkan untuk karyawan *outsourcing* ketentuan pelayanan dan manfaat ditetapkan oleh perusahaan pemasok tenaga kerja. Selama tahun 2015, PTPN III telah merealisasikan anggaran SMK3 mencapai Rp903,400,000 yang secara garis besar dialokasikan untuk menyelenggarakan kegiatan Audit Eksternal SMK3, Pelaksanaan *Hyperkes* di 39 kebun/unit an Pelaksanaan *Hyperkes* di 14 kebun/unit.

c. Tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada aspek sosial kemasyarakatan diarahkan pada program-program yang bersifat memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di lokasi sekitar perseroan berkegiatan. Terutama para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi kurang mampu.

Perseroan mengimplementasikan program CSR melalui program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri BUMN No.Per.09/MBU/07/2015 tentang program Bina Lingkungan BUMN. Kedua program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap *stakeholder* berupa

:

- 1) Kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat
- 2) Pelestarian lingkungan
- 3) Hubungan baik dan kerja sama dengan stakeholder

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) mewujudkan tanggung jawab perusahaan di bidang sosial dan kemasyarakatan melalui realisasi Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Koperasi sejak tahun 1992 dan pelaksanaan Program Bina Lingkungan sejak tahun 2000. Program Kemitraan (PK) dilaksanakan dengan suatu konsep pembinaan terpadu dan berkesinambungan yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan lembaga/instansi terkait yang berkompeten dibidangnya.

Didalam pelaksanaannya PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyisihkan maksimal 2% dari laba bersih untuk Program Kemitraan, yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, serta 2% dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan yaitu program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di Wilayah Usaha BUMN melalui pemanfaatan dana dari BUMN.

Dalam melaksanakan kegiatannya pada tahun 2015, Bagian PKBL PT Perkebunan Nusantara III telah melakukan kegiatan antara lain :

- 1) Menyalurkan Pinjaman kepada Usaha Kecil, Menengah di tahun 2015 sebesar Rp13.540.000.000,- kepada 350 UKM.
- 2) Sampai dengan tahun 2015, PT Perkebunan Nusantara III telah menyalurkan pinjaman kepada UKM sebesar Rp218.053.552.113,- kepada 6.818 UKM di 22 Pemko/Pemkab. di Wilayah Sumatera Utara.
- 3) Melaksanakan Pembinaan berupa pelatihan Kewirausahaan bagi Usaha Kecil dan Menengah yang baru mendapat pinjaman modal kerja.

- 4) Mengikutsertakan Mitra Binaan Unggulan dalam Pameran-Pameran didalam maupun luar negeri untuk memperkenalkan produk-produk Mitra Binaan.
- 5) Melaksanakan program pelatihan sulaman border dan pembuatan sepatu di Wilayah Pemerintahan Kota Medan
- 6) Pelatihan pembuatan tempe dan tahu di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Labuhan Batu.

Selain kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut, sebagai perusahaan BUMN bidang perkebunan yang peduli pada masyarakat lingkungan, PTPN III juga telah menyalurkan dana CSR Tahun 2015 sebesar ± Rp3.452.725.291,- (tiga milyar empat juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) untuk menyelenggarakan kegiatan sosial dan kemasyarakatan

d. Tanggung jawab sosial terkait tanggung jawab terhadap konsumen

Perseroan menyadari makna penting dan manfaat dari pemenuhan standar kualitas serta perlindungan konsumen terhadap setiap produk yang dihasilkan, mengingat keduanya mempunyai pengaruh yang signifikan bagi pertumbuhan kinerja usaha secara berkelanjutan. Perseroan menetapkan dan memberlakukan kriteria yang ketat dalam proses dan output produksi maupun pengawasan kualitas setiap produknya.

Perseroan menjaga Komitmen atas jaminan kualitas produk dan komitmen terhadap pelayanan pelanggan Komitmen ini sangat penting karena selain mempengaruhi kelancaran operasional bisnis juga merupakan faktor penentu tingkat kepercayaan konsumen agar terus menggunakan jasa Perseroan.

Oleh karena itu Perseroan selalu memberikan jaminan bahwa kualitas pelaksanaan proyek telah sesuai dengan kesepakatan kontrak terkait. Jaminan

kualitas dikontrol melalui penerapan manajemen mutu yang melibatkan konsumen dalam memberikan pengukuran terhadap kualitas pelaksanaan proyek.

Perseroan memberikan tanggapan yang cepat terhadap berbagai permintaan dan keluhan konsumen sebagai bagian dari komitmen pelayanan Perseroan. Perseroan meyakini penerapan komitmen pelayanan terbaik akan mampu mendukung target peningkatan kinerja Perseroan di masa mendatang. Untuk menjamin pelayanan pada pelanggan, Perseroan membukalayanan pengaduan dengan menyediakan saluran telpon, email maupun surat kepada pelanggan.

PTPN III (Persero) melakukan strategi penjualan Kelapa Sawit dan Karet dengan sistem Tender dan *Bid Offer* maupun *Long Term Contract (LTC)* yang mengacu pada formulasi harga sesuai *Term of Regulation (TOR)* Tata Cara dan Ketentuan Penjualan Komoditi Perkebunan di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara serta memperkuat analisa pasar dengan mencari informasi harga dari berbagai sumber tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi kondisi pasar Kelapa Sawit dan Karet. Strategi tersebut didukung dengan faktor-faktor utama keberhasilan antara lain :

- 1) Ketepatan waktu dalam pengiriman barang sesuai dengan kontrak yang telah disepakati
- 2) Mutu produk sesuai dengan SNI
- 3) Kondisi peralatan pabrik yang sesuai standar
- 4) Kesesuaian produk yang dipesan dan yang diterima pembeli sesuai dengan kontrak
- 5) Komunikasi yang efektif antara PTPN III (Persero) dengan pelanggan dalam menyelesaikan setiap keluhan/komplain pelanggan

Untuk memenangkan persaingan usaha PTPN III harus mampu memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Memberikan pelayanan dengan cara memberikan produk yang berkualitas, harga yang kompetitif dan penyerahan produk tepat waktu merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dalam menghadapi persaingan usaha PTPN III (Persero) berupaya mempertahankan pelanggan yang loyal dan sekaligus memperluas pasar untuk mendapatkan pelanggan baru. Guna mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan PT perkebunan Nusantara III melakukan komunikasi dengan pelanggan untuk berbagi informasi melalui :

- 1) Komunikasi langsung
- 2) Komunikasi melalui telepon
- 3) Kunjungan Pelanggan ke PPabrik Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Karet

Mekanisme penanganan keluhan pelanggan dikelompokkan menjadi :

- 1) Keluhan Ringan, Keluhan yang disebabkan proses administrasi dan pelayanan.
- 2) Keluhan Sedang, Keluhan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian mutu dan kuantitas produk.
- 3) Keluhan Berat, Keluhan yang menyebabkan timbulnya klaim dari pelanggan (penggantian barang atau denda).

PTPN III (Persero) menyadari peran penting informasi kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan serta loyalitas pelanggan yang akan dapat menjadi acuan dalam merespon perubahan berbisnis dari ekonomi industri ke era ekonomi digital sehingga perusahaan dapat merumuskan kembali visi, misi, tata nilai (*values*) serta strategi perusahaan terimplementasi dalam kehidupan bisnis perusahaan. Oleh karena itu kepuasan pelanggan merupakan prioritas utama dalam kinerja perusahaan sebagai

informasi yang terkini dan valid sebagai bahan dalam melakukan desain ulang strategi yang bermanfaat dalam pengembangan produk. Karena pelanggan sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan maka PTPN III (Persero) secara periodik melakukan Survey Kepuasan Pelanggan yang bertujuan untuk memperoleh informasi antara lain :

- 1) Produk yang ditawarkan dapat diterima dan didukung oleh pelanggan pasar;
- 2) Upaya yang harus dilakukan perusahaan dalam membangun dan mengelola hubungan dengan pelanggan serta usaha dan upaya untuk menarik pelanggan baru;
- 3) Mengetahui keinginan/permintaan dan keluhan pelanggan terhadap produk dan pelayanan produk antara lain konsistensi mutu, harga, ketepatan waktu penyediaan barang/pengiriman barang serta komunikasi;
- 4) Mengetahui citra perusahaan di mata pelanggan;
- 5) Memperbaiki kinerja perusahaan melalui pengidentifikasian *Room to Improve*;
- 6) Sebagai dasar dalam penyusunan dan monitoring rencana tindak lanjut ke depan.

Kelapa Sawit merupakan produk andalan PTPN III (Persero). Sekitar 80% - 90% pendapatan perusahaan diperoleh dari komoditas ini berikut hasil olahannya berupa : Minyak Sawit (CPO), *Palm Kernel Oil* (PKO), *Palm Kernel Mill* (PKM) dan Inti Sawit (IS). Penjualan komoditas ini di pasar lokal dari tahun ke tahun memperlihatkan peningkatan.

Pada tahun 2015 PTPN III telah melakukan persiapan penjualan produk Kelapa Sawit Sertifikasi yaitu:

- 1) Penjualan sertifikat RSPO non fisik (Green Palm) tahun 2015 telah terjual sebanyak 161.103 Ton dengan nilai tambah yang diterima PTPN III sebesar USD 686.753,82;
- 2) CPO *Renewable Fuel Standard* (RFS) dengan sistem *Long Term Contract* (LTC) dengan premium sebesar USD 15/MT;
- 3) PKO *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dengan sistem *Long Term Contract* (LTC) dengan premium sebesar USD 40/MT;
- 4) CPO RSPO *Mass Balance* dengan premium sebesar USD 7/MT.

Komoditas Karet menyumbang 5% - 20% pendapatan PTPN III (Persero). Produk Karet PTPN III (Persero) ditujukan untuk pasar lokal dan pasar ekspor, masing-masing dengan kontribusi sebesar 41,36% pasar lokal dan 58,64% untuk pasar ekspor dengan tujuan ekspor India, Jepang, China, Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Dubai.

Untuk membangun komunikasi dua arah dengan pelanggan dan sekaligus untuk meningkatkan mutu layanan kepada konsumen, Perseroan melakukan berbagai hal, mencakup: Membuka layanan pengaduan pelanggan melalui beberapa saluran, yakni melalui telepon bebas pulsa, surat, email dan SMS Perseroan juga melakukan evaluasi secara tuntas terhadap setiap keluhan yang disampaikan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah terjadinya keluhan serupa.

2. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial PT Perkebunan Nusantara III

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah pendekatan biaya yang dikeluarkan, yang menggambarkan semua pengeluaran dalam satuan uang untuk setiap kegiatan sosial yang telah dilakukan perusahaan. Pendekatan ini menyajikan daftar pengeluaran dari masing-masing aktifitas sosial perusahaan yang diukur dalam satuan uang.

Pendekatan ini dapat menggambarkan *comparability*, yaitu hasil satu tahun dapat dibandingkan dengan tahun lainnya, dalam hal-hal yang berhubungan dengan komitmen keuangan untuk kegiatan sosial. Hal ini dapat dilihat dalam laporan biaya sosial pada tabel di bawah ini, dimana perusahaan mengeluarkan biaya sosial untuk periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Menurut Sumaryo (2009), konsep tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu pendekatan perubahan atau pengembangan masyarakat khususnya peningkatan sumberdaya manusia. Pendekatan ini dimaksudkan agar masyarakat terlibat atau menjadi bagian dari perusahaan dan menikmati manfaat dari keberadaan perusahaan yang berada di sekitar wilayah masyarakat.

Kontribusi kepada masyarakat menggambarkan peran aktif perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar baik yang bersifat produktif maupun kegiatan sosial. Kontribusi terhadap lingkungan hidup merupakan partisipasi perusahaan dalam merawat dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup. Kontribusi terhadap sumber daya manusia merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya dengan harapan dapat meningkatkan kinerja mereka. Karena dengan meningkatnya kinerja karyawan maka produksi perusahaan dapat meningkat dan akhirnya laba perusahaan menjadi meningkat pula.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwasannya perusahaan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan kedalam 4 kategori yaitu lingkungan hidup, ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan dan konsumen, hal ini juga seperti hasil penelitian yang dilakukan adzantika (2012) bahwa pada PT SIER (Persero) tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan kedalam 4 kategori di atas.

Dalam melakukan penilaian akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat dilihat dengan cara melakukan perhitungan atas jumlah proposi biaya CSR yang

dikeluarkan perusahaan dari tahun ke tahun, perhitungan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan total biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan dari tahun 2011-2015, kemudian biaya CSR yang dikeluarkan tiap tahunnya dibagi dengan total biaya CSR, sehingga didapatkan proporsi biaya CSR dari tahun ke tahun, hal ini kemudian dibandingkan dengan melihat proporsi biaya CSR dari tahun ke tahun.

Kewajiban melaksanakan CSR oleh pemerintah, sekarang ini bukan hanya dibebankan pada BUMN. Melalui Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 pasal 15(b) dan pasal 16 (d) tentang Penanaman Modal (UU PM), maka setiap perseroan atau penanam modal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Kebijakan ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Namun proporsi biaya CSR yang harus dikeluarkan perusahaan belum ditetapkan oleh pemerintah, sehingga perusahaan masih mengeluarkan biaya CSR secara variatif.

Berikut adalah tabel persentase kenaikan dan penurunan biaya CSR pada PT Perkebunan Nusantara III dari tahun 2011-2015 :

**Tabel IV.1 Persentase Kenaikan/Penurunan Biaya CSR
Periode 2011-2015
(dalam Ribuan)**

Tahun	Biaya CSR dikeluarkan	Proporsi	Persentase Kenaikan/ Penurunan
2011	30.722.597	22,23%	
2012	17.837.832	12,91%	-9,32%
2013	7.731.003	5,59%	-7,31%
2014	42.084.951	30,46%	24,86%
2015	39.800.644	28,80%	-1,65%
Total	138.177.027	100,00%	

Sumber : Data Keuangan (2017) Diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 proporsi biaya CSR yang dikeluarkan adalah sebesar 22,23% dari total biaya CSR tahun 2011-2015, yaitu sebesar 30.722.597, kemudian pada tahun 2012 biaya CSR mengalami penurunan 9,32% menjadi sebesar 12,91% atau 17.837.832, kemudian pada tahun 2013 mengalami penurunan 7,31% menjadi 5,59% atau 7.731.003, pada tahun 2014 biaya CSR meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 24,86% menjadi sebesar 30,46% atau 42.084.951 dan pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan 1,65% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 28,80% atau 39.800.644.

Nilai alokasi biaya sosial yang bervariasi tersebut terjadi karena tidak adanya aturan baku yang ditetapkan oleh Pemerintah mengenai jumlah biaya sosial yang harus diberikan oleh perusahaan. Untuk itu diperlukan suatu informasi mengenai hubungan antara besarnya penurunan/kenaikan penjualan bersih dengan biaya sosial, hal ini diperlukan untuk melihat apakah pada PT Perkebunan Nusantara III pengeluaran biaya CSR berhubungan dengan penjualan bersih yang dilakukan oleh perusahaan. Berikut adalah perbandingan atau proporsi biaya CSR terhadap penjualan perusahaan :

Tabel IV.2 Proporsi Biaya CSR terhadap Penjualan Bersih

Tahun	Pendapatan	Biaya CSR dikeluarkan	Persentase Proporsi CSR
2011	6.538.892.766	30.722.597	0,470%
2012	5.963.806.274	17.837.832	0,299%
2013	5.732.517.940	7.731.003	0,135%
2014	39.497.963.053	42.084.951	0,107%
2015	36.212.111.250	39.800.644	0,110%

Sumber : Data Keuangan (2017) Diolah

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa pada tahun 2011 proporsi CSR adalah sebesar 0,470% dengan pendapatan sebesar 6.538.892.766 dan biaya CSR yang dikeluarkan sebesar 30.722.597, tahun 2012 proporsi CSR adalah sebesar 0,299%

dengan pendapatan sebesar 5.963.806.274 dan biaya CSR yang dikeluarkan sebesar 17.837.832, tahun 2013 proporsi CSR adalah sebesar 0,135% dengan pendapatan sebesar 5.732.517.940 dan biaya CSR yang dikeluarkan sebesar 7.731.003, tahun 2014 proporsi CSR adalah sebesar 0,107% dengan pendapatan sebesar 39.497.963.053 dan biaya CSR yang dikeluarkan sebesar 42.084.951, tahun 2015 proporsi CSR adalah sebesar 0,110% dengan pendapatan sebesar 36.212.111.250 dan biaya CSR yang dikeluarkan sebesar 39.800.644.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwasannya persentase biaya CSR yang dikeluarkan PT Perkebunan Nusantara III tidak berhubungan dengan penjualan bersih perusahaan. Perusahaan mengeluarkan biaya CSR melalui penetapan anggaran pada awal tahun yang penetapan anggaran tersebut berdasarkan evaluasi hasil realisasi yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan peneliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Perkebunan Nusantara III telah melaksanakan pelaksanaan aktifitas tanggung jawab sosial sesuai yang telah digariskan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas BAB V TJSL pasal 74 ayat 1 – 4 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
2. Dalam melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan, PT Perkebunan Nusantara III melakukan aktifitas berupa tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup, tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan dan tanggung jawab sosial terkait tanggung jawab terhadap konsumen.
3. Penentuan besaran biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan melalui penetapan anggaran pada awal tahun yang penetapan anggaran tersebut berdasarkan evaluasi hasil realisasi yang dilakukan pada tahun sebelumnya
4. PT Perkebunan Nusantara III mempunyai komitmen yang kuat atas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban perusahaan.

B. Saran

1. Kepada Pihak Perusahaan, diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih maksimal atas aktifitas tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan terutama dalam tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, agar pemberian dana sosial kepada mitra binaan dapat tepat sasaran dan memiliki dampak positif sehingga pemberian biaya menjadi produktif, seperti pengawasan terhadap pemberian biaya sosial bagi kelompok usaha di tiap daerah.
2. Kepada pihak pemerintah, disarankan untuk segera membuat aturan yang berisi tentang format baku laporan biaya sosial perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya baik itu bentuk laporannya maupun besarnya proporsi biaya sosial tersebut terhadap penjualan atau laba bersih perusahaan. Sehingga pemerintah mempunyai tolok ukur yang jelas terhadap perusahaan – perusahaan yang mempunyai atau tidak mempunyai tanggung jawab sosial pada lingkungan sekitarnya dan terhadap perusahaan yang tidak memenuhi aturan tersebut bisa dikenakan sanksi baik administratif ataupun sanksi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Astari (2014), Penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial Pada PT. Sier (Persero), STIESIA Surabaya.
- Arfan Ikhsan (2008) Metode Penelitian Akuntansi Keprilakuan, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Basu, Swastha, & Irawan, 2001, Manajemen Pemasaran Modern, Liberty. Yogyakarta.
- Hansen dan Mowen. 2007. *Manajemen Biaya*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kotler, Philip dan Nancy Lee. 2005. *Corporate Social Responsibility; Doing the Most Good you're your Company and Your Cause*. New Jersey; John Wiley & Sons, Inc
- Lucia (2013) Analisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban Sosial terhadap lingkungan dan masyarakat untuk Mengukur kinerja sosial pada PT. Astra international, Tbk. FE, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nursahid, Fajar. 2006. Tanggung jawab sosial BUMN "Analisis terhadap Model Kedermawanan Sosial PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia". Penerbit Pustaka, Depok
- Noviyanti (2015) Perilaku Sosial PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Sebagai Bentuk Pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitar
- Prasetyo dan Rudianto. 2006. "Akuntansi Koperasi", Jakarta : Grafindo
- Suharto, E. 2005. Pekerjaan Sosial di Dunia Industri (Corporate Social Responsibility). Bandung: PT. Refika Aditama
- Soemarso, Jakarta, 2004, Akuntansi sebagai pengantar : Salemba Empat
- Susenohaji. 2003. Environmental Management Accounting, Biaya Lingkungan, Informasi Strategis. (online). ([http:// digilib.gunadarma.ac.id/..](http://digilib.gunadarma.ac.id/) diakses 19 Januari 2017).
- Untung, Hendrik Budi, 2008. Corporate Social Responsibility, Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Wibisono. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. Surabaya: Media Grafika

DAFTAR WAWANCARA

“Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial pada PT Perkebunan Nusantara (persero) III”

1. Berapakah besaran biaya CSR yang dikeluarkan PT Perkebunan Nusantara (Persero) III?

Jawab :

Adapun besaran biaya CSR yang dikeluarkan PT Perkebunan Nusantara (Persero) III tertuang dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan yang juga bisa dilihat di website PTPN III.

2. Apakah dasar pengeluaran biaya CSR?

Jawab :

Terkait dasar pengeluaran biaya CSR sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun, dan penetapan anggaran CSR berdasarkan realisasi yang terjadi pada tahun sebelumnya.

3. Siapakah Objek penerima CSR?

Jawab :

Objek penerima CSR yaitu anak perusahaan dan juga mitra perusahaan yang telah memiliki hubungan kerjasama yang baik atas timbal balik kepentingan.

4. Apakah yang menjadi syarat bagi penerima CSR?

Jawab :

Tidak ada syarat tertentu, hanya saja penerima CSR merupakan kategori mitra yang memiliki keseriusan dan telah dipantau pihak yang berkenaan dengan pengembangan SDM dan hubungan mitra.

5. Apakah manfaat pengeluaran biaya CSR?

Jawab :

Manfaat pengeluaran biaya CSR selain sebagai kewajiban perusahaan atas aturan pemerintah, juga sebagai dasar pembinaan hubungan baik dengan masyarakat yang juga merupakan konsumen dan juga sebagai bukti kepedulian perusahaan kepada masyarakat sehingga sama-sama memberikan keuntungan baik dari segi promosi perusahaan juga dari segi kesejahteraan masyarakat.

6. Apakah dasar pelaporan biaya CSR?

Jawab :

Dasar pelaporannya masih menggunakan standar perusahaan karena belum di atur dengan rinci dalam PSAK

7. Bagaimana aturan akuntansi pertanggungjawaban?

Jawab :

Dasar pelaporannya masih menggunakan standar perusahaan karena belum di atur dengan rinci dalam PSAK

Pewawancara,

Pihak Perusahaan

.....

.....